

**LAPORAN
PENELITIAN MADYA
BIDANG PENELITIAN BAHAN AJAR**



**POLA ADAPTASI MASYARAKAT BETAWI
SEBAGAI DAMPAK PERUBAHAN OKUPASI
TERHADAP PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN**
(Studi di Wilayah Kecamatan Pamulang,
Tangerang Selatan, Propinsi Banten)

Oleh:

Dra. Rosa Tosaini, M.Hum. (Ketua)
H.I. Bambang Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Anggota)
Dra. Farwitaningsih, MSi. (Anggota)

**FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN 2010**



**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN BAHAN AJAR**

1.	a. Judul penelitian :	Pola Adaptasi Masyarakat Betawi Sebagai Dampak Perubahan Okupasi Terhadap Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Studi di Wilayah Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Propinsi Banten)
	b. Bidang Penelitian :	Bahan Ajar Pengantar Sosiologi (ISIP 4410) Teori Perubahan Sosial (SOSI4305)
	c. Klasifikasi Penelitian :	Penelitian Madya
2.	Ketua Peneliti : a. Nama Lengkap dan gelar b. NIP : c. Pangkat, Golongan d. Program Studi/Jurusan e. Fakultas :	Dra. Rosa Tosaini, M.Hum 19490529198203 2 001 Lektor /Penata / IIIc Jurusan Sosiologi FISIP - UT
3.	Nama Anggota Peneliti a. Jumlah Anggota : b. Nama Anggota dan Unit Kerja: c. Program Studi :	2 orang 1. H.I. Bambang Prasetyo, M.Si (FISIP) 2. Dra. Parwitaningsih, M.Si (FISIP) - Sosiologi
4.	a. Periode penelitian: b. Lama Penelitian : c. Waktu penelitian :	Tahun 2010 6 (enam bulan) 4 jam/ hari / → 2 hari/ minggu
5.	Biaya Penelitian :	Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
6.	Sumber Biaya :	LPPM – Universitas Terbuka
7.	Pemanfaatan Hasil Penelitian :	Pertarikan dan pengayaan Bahan Ajar

Jakarta, 22 Desember 2010

Ketua Peneliti,

Rosa Tosaini

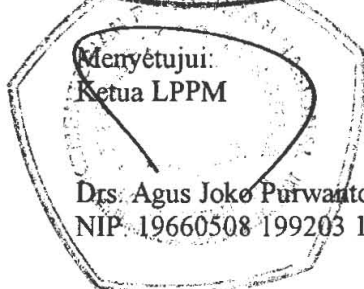
Dra. Rosa Tosaini, M.Hum
NIP. 19490529 198203 2 001

Menyetujui:

Kepala Pusat Keilmuan,

Endang Nugraheni

Dra. Endang Nugraheni, MEd
NIP. 19570422 198503 2 001





ABSTRAK

Berbagai pembangunan baik berupa jalan tol dan munculnya pemukiman baru ini memiliki efek pada kehidupan masyarakat asli di daerah penyanggah, baik dalam pola, cara hidup, jenis mata pencaharian atau pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka yang tadinya memiliki lahan lalu menjual tanah pertanian atau ladang yang dimilikinya, yang pada awalnya merupakan tumpuan hidup dan mata pencaharian mereka, kepada para pengembang maupun pada pemerintah untuk dipakai sebagai jalan ataupun untuk lahan perumahan-perumahan baru. Meski bersifat insentif, pembangunan prasarana jalan selalu saja memunculkan persoalan yang kompleks dan tidak ringan.

Perubahan okupasi penduduk ternyata juga memiliki dampak terhadap ikatan sosial antara individu yang satu dengan yang lain. Durkheim (Turner, 2001), mengatakan bahwa pada suatu masyarakat dapat terjadi perubahan dari yang berpola organik menjadi berpola mekanik. Kondisi ini yang disebut oleh Parson sebagai pola adaptasi masyarakat. Dengan dasar tersebut penelitian ini ingin melihat tentang bagaimana pola adaptasi yang dilakukan masyarakat sebagai dampak perubahan okupasi terhadap pembentukan kota Tangerang Selatan.

Dari hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan wilayah bergantung pada lokasi atau juga jarak daerah tersebut dari pusat Pembentukan Kota Tangerang Selatan telah menyebabkan adanya perubahan baik secara fisik maupun non fisik pada kehidupan sosial Orang Betawi di daerah Tangerang Selatan. Perubahan fisik dapat dilihat dengan adanya berbagai pembangunan fasilitas bagi masyarakat. Perubahan non fisik terkait dengan pola adaptasi yang harus dilakukan oleh orang Betawi antara lain adalah *perubahan okupasi*; yang harus mereka tempuh sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar yang mengalami perubahan antara lain dengan semakin banyaknya pendatang yang bermukim di kota Tangerang Selatan. Adaptasi yang dilakukan oleh Orang Betawi merupakan upaya agar tetap terwujud keseimbangan dalam masyarakat (sebagai suatu sistem) Tangerang Selatan maupun masyarakat Betawi sendiri. Dengan tercapainya keseimbangan dalam masyarakat maka tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat sebagai suatu system juga akan dapat tetap terlaksana.

Keyword: adaptasi, perubahan sosial.



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan visi Universitas Terbuka (UT), peningkatan kualitas penelitian selalu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas secara tersistem dan berkesinambungan. Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas baik bagi peneliti maupun kegiatan penelitiannya, maka tim peneliti sebagai staf edukatif (dosen) di Universitas Terbuka, terdorong untuk melakukan penelitian Bidang Penelitian Pengayaan Bahan Ajar dengan tujuan untuk mendukung secara substantif revisi bahan ajar UT. Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tentang pengayaan bahan ajar dengan judul: "*Pola Adaptasi Masyarakat Betawi sebagai Dampak Perubahan Okupasi Terhadap Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Propinsi Banten)*" yang dilakukan dengan biaya dari Universitas Terbuka melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk itu tim peneliti mengucapkan terima kasih.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dari penelitian ini tim peneliti telah melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam yang ditujukan pada warga yang tinggal di daerah sekitar Tangsel. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tim peneliti juga melakukan observasi/pengamatan terhadap kegiatan penduduk sekitar daerah penyanggah. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan setelah dianalisa, akan direkomendasikan sebagai bahan pengayaan untuk merevisi dua materi bahan ajar yaitu: Matakuliah Pengantar Sosiologi (ISIP 4410) dan Teori Perubahan Sosial (SOSI 4305)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim adalah menulis laporan pelaksanaan penelitian tentang "*Pola Adaptasi Masyarakat Betawi sebagai Dampak Perubahan Okupasi Terhadap Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Propinsi Banten)*" Laporan ini kami sajikan semaksimal mungkin. Namun kami menyadari bahwa laporan ini tentulah belum sempurna. Oleh karena itu masukan dan kritik membangun dari para pembaca masih kami harapkan.

Jakarta, 22 Desember 2010

Tim Peneliti



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv-v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
Kajian Pustaka	6
BAB III : METODOLOGI	
A. Hipotesa	12
B. Lokasi	
C. Informan	12
D. Pendekatan Penelitian	13
E. Analisis Data	13

BAB IV: PROFIL KOTA TANGERANG SELATAN

A. Sejarah Terbentuknya Kota Tangerang Selatan	14
B. Sejarah Masyarakat Tangerang	15
C. Profil Kecamatan Pamulang	17

BAB V : PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian	19
-----------------------------------	----

BAB VI: SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan dan Rekomendasi	23
--------------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Curriculum Vitae

UNIVERSITAS TERBUKA



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jakarta adalah kota pertama di Indonesia yang memiliki jalan tol. Lebih dari 25 tahun yang lalu jalan tol yang menghubungkan Jakarta dan Bogor, yaitu Tol Jagorawi, dioperasikan. Pengoperasian jalan tol Jagorawi ini menawarkan kemudahan mobilitas dari arah timur dan selatan Jakarta. Akibatnya, tidak dapat dielakkan lagi, terjadilah alih fungsi lahan, dari lahan pertanian dan hutan kota menjadi kawasan pemukiman dan industri. Pergeseran wilayah pemukiman ke arah timur dan selatan Jakarta itu, kini terlihat dari tingginya intensitas perjalanan dari arah tersebut ke pusat kota. Di sisi lain, pola pembangunan yang terpusat pada kota-kota besar sebagai pusat bisnis membuat pemukiman bagi warga bergeser pada daerah pinggiran. Kota-kota seperti Bekasi, Tangerang, Serang dan Depok merupakan wilayah yang dijadikan sebagai lokasi pemukiman penduduk. Akibat lebih jauh adalah terciptanya pola komuter dari penduduk yang tinggal di daerah pinggiran, di mana hal ini menyebabkan efek berantai berupa kemacetan dipintu-pintu masuk ke kota Jakarta. (H.I.Bambang Prasetyo, 2007-) Kondisi ini juga secara tidak langsung berdampak pada Tangerang Selatan. Kota yang baru saja lahir ini sedang berusaha untuk mengembangkan wilayahnya agar terlihat pantas sebagai sebuah kota. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan (Mardiasmo;2002)

Dalam pelaksanaannya otonomi daerah ternyata tidak selalu berjalan mulus. Di banyak tempat terjadi penolakan-penolakan serta keberatan dari warganya. Seperti misalnya rencana pemerintah yang akan memperluas wilayah hilir Situ Gintung atau daerah limpasan ditolak oleh warga yang tinggal di lokasi tersebut. “Ini sama saja mengusir kami,” ujar Effendi Mukmin, tokoh masyarakat yang tinggal di kampung Gitung RT 01, RW 04 kepada Tempo. Mukmin yang telah menetap di lokasi itu sejak tahun 1960 itu mengatakan dengan perluasan daerah limpasan situ menjadi enam meter ditambah 10 meter untuk wilayah hijau akan menghabiskan wilayah tempat tinggal mereka. “Semuanya akan habis,” katanya. (Tempointeraktif.com, 4 Mei 2009)

Demikian pula dalam proyek pelebaran Jalan Raya Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan, terhambat karena masalah ganti rugi dengan masyarakat. Sedikitnya delapan pengusaha pemilik bangunan menuntut ganti rugi tanahnya dicaplok untuk pelebaran jalan. Pemilik toko keramik Ny. Sansan (40) mengatakan, sekitar 1,5 meter tanah miliknya dihancurkan Dinas Bina Marga Pemprop Banten untuk dijadikan pelebaran jalan. Meski telah menyetujui pelebaran jalan itu namun belum ada ganti rugi yang diberikan pemerintah setempat kepada dirinya maupun tujuh pengusaha lain yang memiliki tempat usaha yang berjejer di sepanjang Jalan Siliwangi. “Saya memiliki sertifikat tanah dan IMB, wajar saya meminta ganti rugi. Kok bisa-bisanya diperlebar tanpa ada ganti rugi,” ungkap warga Siliwangi RT02/07, di kantor Kecamatan Pamulang. Keluhan tidak hanya dilontarkan Ny. Sansan, pengusaha Bimbingan Belajar (Bimbel) LPIA Ny. Peni juga mengeluhkan hal yang sama. Menurut Peni, parkir kantor LPIA sepanjang 24 meter dihancurkan untuk pelebaran jalan Siliwangi, tak serupiahpun yang diterima dirinya setelah sejumlah pekerja kasar meratakan parkiran LPIA. Bahkan, akibat proyek pelebaran tersebut, sejumlah konsumennya sulit untuk memarkirkan kendaraan. (Tangerangonline.com, 4 Mei 2009)

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi mengatakan, ada tiga misi yang harus diemban pemerintahan otonom baru ini. Ketiga misi itu adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing daerah. Untuk mewujudkan ketiga misi itu, kata Arif, maka pemerintah harus betul-betul mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan rakyat. "Misalnya untuk pendidikan, kami hanya menitipkan pesan jika APBD Tangsel tahun 2010 setidaknya 20 persen dialokasikan untuk bidang pendidikan,"katanya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel Hasdanil menambahkan, Pemkot Tangsel memprioritaskan 6 sektor yang akan didahulukan dalam pembangunan. Keenam sektor tersebut adalah, pemerintahan, insfrastuktur, kesehatan, pendidikan, rehabilitasi Situ Gintung, dan kesejahteraan masyarakat. (Radarbanten.com, 4 Mei 2009)

Kondisi lain yang terjadi adalah adanya upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang akan menertibkan 2.371 usaha perdagangan yang ada di sekitar itu. "Izin usaha dan perdagangan barangnya akan kita tinjau dan data ulang," ujar Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan, Mursan Sobari, kepada Tempo, Rabu siang (29/4) ini. Selain usaha perdagangan, pemerintah daerah setempat juga akan melakukan penertiban izin 83 mal, 28 pasar modern, enam pasar tradisional, 284 koperasi, dan 2.427 usaha kecil menengah. "Ini akan kita mutakhirkan lagi," katanya. Mursan mengatakan penertiban meliputi izin yang dimiliki para usaha perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah. "izin akan diputihkan atas nama pemerintah kota Tangerang Selatan," katanya. Menurutnya, hal itu penting dilakukan sehubungan bergantinya pelayanan industri perdagangan dari Kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangerang Selatan. (Tempointeraktif.com, 29 April 2009).

B. Permasalahan

Berbagai pembangunan baik berupa jalan tol dan munculnya pemukiman baru ini memiliki efek pada kehidupan masyarakat asli di daerah penyanggah, baik dalam pola, cara hidup, dan jenis mata pencaharian atau pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka yang tadinya memiliki lahan lalu menjual tanah pertanian atau ladang yang dimilikinya,

yang pada awalnya merupakan tumpuan hidup dan mata pencaharian mereka, kepada pengembang maupun pada pemerintah untuk dipakai sebagai jalan ataupun untuk lahan perumahan-perumahan baru. Meski bersifat insentif, pembangunan prasarana jalan selalu saja memunculkan persoalan yang kompleks dan tidak ringan. Dengan demikian melalui penelitian ingin mengetahui bagaimana

Timbulnya reaksi-reaksi berdimensi sosial ekonomi, seolah-olah menjadi bagian tak terpisahkan dan menjadi dinamika yang harus disiasati. Penyiasatan dan pengelolaan terhadap berbagai reaksi dan gejolak sosial yang muncul, menjadi mutlak dilakukan agar kemunculannya tidak malah menjadikan kontraproduktif. Di antaranya menyangkut keterancaman sejumlah lahan pertanian yang kelak bakal terlintasi jalur jalan tol tersebut. Selain itu, informasi adanya proyek jalan tol juga telah mendorong spekulasi tanah untuk "bermain" dan mengambil kesempatan serta peluang bisnis di dalamnya. Kekhawatiran masyarakat itu memiliki alasan. Pemerintah sendiri jelas-jelas menggariskan kebijakan yang menempatkan pembangunan industri agro sebagai prioritas. Pembangunan industri agro dalam konsep pembangunan sektor pertanian telah ditempatkan sebagai basis dalam memperkokoh struktur ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan diversifikasi hasil usaha.

Akibat lebih jauh adalah pola okupasi yang sudah lama 'dianut' juga mengalami pergeseran. Mereka yang tadinya petani, dengan beralih fungsinya lahan pertanian yang mereka miliki, maka beralih pulalah pekerjaan mereka. Ada yang menjadi tukang ojek, ada pula yang menjadi pengusaha kecil-kecilan dengan membuka warung/toko, dan juga yang menjadi pembuat batu bata/batako yang banyak dibutuhkan oleh para pengembang perumahan. Menurut Kepala Bidang Produksi Pertanian Dinas Perternakan dan Pertanian Kabupaten Tangerang, penyusutan terjadi karena banyak pemilik tanah menjual lahan sawahnya dan dialih fungsikan menjadi perumahan dan tempat usaha. Selain terancam habis, Hari menambahkan, dampak penyusutan lahan itu menyebabkan terjadinya penurunan tingkat produksi pangan. Karenanya, dia menegaskan agar semua pihak memperhatikan betul masalah ini. "Alih fungsi lahan jelas tidak bisa dibiarkan." Mengatasi masalah itu, lanjutnya, Pemkab Tangerang telah mengupayakan agar penyusutan serta alih fungsi lahan itu tidak terus terjadi. Keputusan

Presiden tentang Pengalihan Fungsi Lahan pun digunakan guna mencegah warga agar tidak mengalihkan tanahnya untuk dijadikan rumah atau tempat usaha. Begitu juga agar pemilik sawah tidak menjual lahannya kepada pihak yang ingin membangun perumahan dan usaha lain. Sayangnya, kata Hari, upaya itu tetap tidak bisa mencegah pemilik tanah untuk mengalihkan fungsi lahan mereka. "Sampai sekarang masih banyak warga yang mengalihkan lahannya untuk rumah dan tempat usaha." (Rabu 15 Feb 2006). (<http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=U1AKDAZWUFBU>).

Perubahan okupasi penduduk ternyata juga memiliki dampak terhadap ikatan sosial antara individu yang satu dengan yang lain. Durkheim (Turner, 2001), mengatakan bahwa pada suatu masyarakat dapat terjadi perubahan dari yang berpola organik menjadi berpola mekanik. Kondisi ini yang disebut oleh Parson sebagai pola adaptasi masyarakat. Dengan dasar tersebut penelitian ini ingin melihat tentang bagaimana pola adaptasi yang dilakukan masyarakat sebagai dampak perubahan okupasi terhadap pembentukan kota Tangerang Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui *dampak perubahan okupasi dan pola adaptasi masyarakat Betawi terhadap pembentukan kota Tangerang Selatan, di Propinsi Banten.*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberi masukan berupa pengayaan materi dalam merevisi buku materi pokok Pengantar Sosiologi
2. Memberi masukan berupa pengayaan materi dalam membuat buku materi pokok Teori Perubahan Sosial
3. Sebagai bahan informasi bagi Pemda Tangerang Selatan tentang pola adaptasi masyarakat yang ada



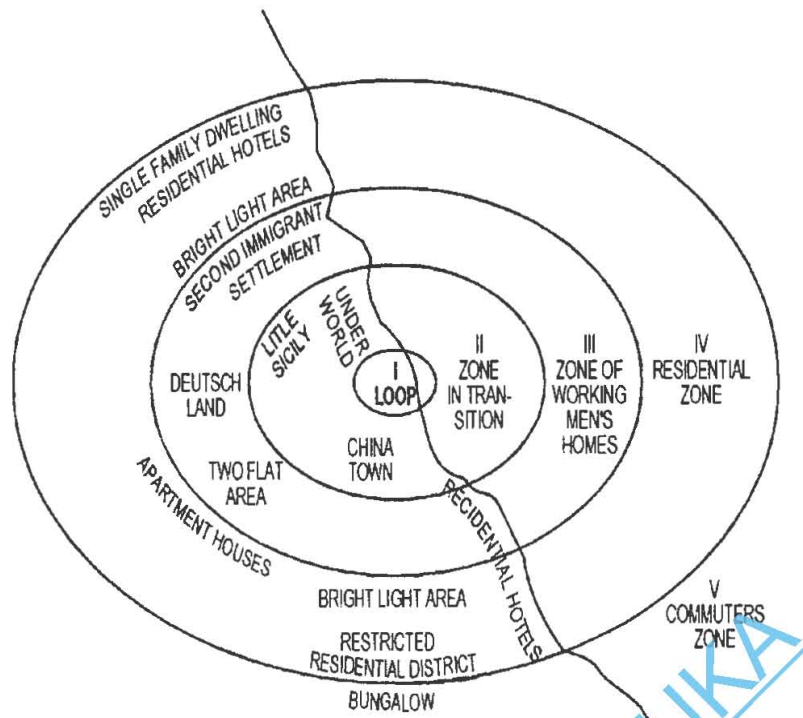
KAJIAN PUSTAKA

Park and Burgess (Park dan Burgess: 1952) mengembangkan sebuah teori yaitu teori ekologi perkotaan yang mengasumsikan bahwa kota itu adalah lingkungan seperti yang ada dalam alam ini, dan dipengaruhi oleh faktor yang sama seperti yang dikemukakan di dalam Teori Darwin, yaitu kompetisi yang mempengaruhi ekosistem. Manakala kota itu dibangun dan tumbuh berkembang, orang-orang dan kegiatannya mengelompok pada daerah tertentu dan proses ini disebut dengan konsentrasi. Sedikit demi sedikit, daerah ini menjadi padat penduduknya, sehingga di situ menyebar orang-orang dan kegiatan mereka yang berada jauh dari pusat kota. Mereka ini lalu mengembangkan daerah pinggiran itu. Mereka menyatakan bahwa, kerja lembur, bersaing untuk mendapatkan tanah, tempat tinggal, dan sumberdaya lainnya yang memang terbatas di daerah *urban* itu menyebabkan daerah tersebut terbagi-bagi menjadi daerah atau tempat dengan karakteristik yang berbeda masing-masing daerah. Setiap daerah atau zona ditinggali oleh orang-orang dengan karakteristik sosial yang sama di mana mereka saling berbagi karena mereka mendapat tekanan atau pengaruh ekologis yang sama.

Sebagaimana suatu daerah yang berkembang makin menjanjikan dan begitu menarik minat orang, maka harga tanah, perumahan, serta sewa tempat tinggal semakin mahal saja, dan orang-orang serta bisnis menyerbu ke daerah tersebut. Park dan Burgess menyebutnya sebagai *succession* atau suksesi (istilah yang dipinjam dari ekologi tanaman) di mana penduduk baru datang menggantikan penduduk lama. Pada skala mikro dan skala makro, masyarakat memang itu hidup sebagai sebuah superorganisme, di mana perubahan itu merupakan aspek alamiah yang merupakan proses pertumbuhan tanpa harus melalui kekacauan. Oleh karenanya, daerah yang teratur lalu dimasuki oleh unsur-unsur baru. Hal ini tentu saja menimbulkan kompetisi di mana suksesi atau pergantian orang-orang serta di mana mereka bertempat tinggal memerlukan reorganisasi.

Kondisi inilah yang melahirkan Teori Zona Konsentrasi atau *Concentric Zone Theory* yang untuk pertama kalinya dipublikasikan di dalam buku *The City* (Park dan Burgess: 1952) di mana teori ini memprediksi bahwa sekali saja kota tumbuh dan berkembang maka ia akan membentuk lima lingkaran konsentrasi dengan kondisi sosial dan fisik yang semakin menipis di daerah yang mendekati pusat kota di mana daerah pinggiran kota juga semakin menjanjikan dan tentu makin mahal harganya. Selain itu, teori ini juga berupaya menjelaskan mengenai keberadaan masalah-masalah sosial seperti pengangguran dan kriminalitas. Di daerah Chicago, misalnya, digunakan pemetaan sinkronik untuk melihat di mana masalah-masalah sosial itu tersebar dan sekaligus membandingkannya antardaerah yang memiliki masalah sosial dimaksud. Pada periode setelah perang (antara daerah Utara dan daerah Selatan), pendekatan kartografis yang digunakan untuk melihat masalah-masalah sosial ini dikritik sebagai sesuatu yang menyederhanakan dan mengabaikan dimensi sosial budaya kehidupan masyarakat daerah *urban*, termasuk juga pengabaian imbas politik dan ekonomi dari industrialisasi di daerah *urban*, serta adanya isu-isu kelas sosial, ras, gender, dan masalah etnis.

Tekanan ekonomi dan interaksi sosial menyebabkan perkembangan suatu bentuk pola di kota-kota besar cenderung yang sama, dengan variasi pada topografinya dan perbedaan-perbedaan lainnya. Pola ini terjadi dengan tidak direncanakan dan tidak di bawah kontrol penguasa (kota). Pemahaman terhadap tatanan ini sangat diperlukan untuk memahami disorganisasi sosial dan karakteristik kehidupan kota. Tingkat masalah sosial paling tinggi terjadi di pusat kota di mana disorganisasi sosialnya juga tinggi dan sebaliknya pada disorganisasi sosial yang rendah ternyata menimbulkan masalah sosial yang juga rendah. Di bawah ini dapat dilihat karakteristik daerah atau kota berdasar teori zona konsentrasi seperti yang telah disinggung di atas.



Karakteristik pola kota berdasarkan pada zona konsentrasi.

Diadaptasi dari Teori Kriminologi, karangan Kemal Darmawan, tahun 2000

Karakteristik pola kota sebagaimana digambarkan oleh Park dan Burgess (Park dan Burgess :1952), diwakili oleh *Zona konsentrasi*. Zona I adalah pusat di mana terdapat wilayah pusat bisnis. Wilayah dipenuhi oleh pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat-tempat hiburan, industri ringan dan berbagai bentuk bisnis lainnya. Banyak penduduk di daerah ini, kecuali penduduk yang tinggal sementara di hotel-hotel besar dan orang-orang tanpa rumah (*hobohemia*) di bagian pinggiran wilayah bisnis. Zona II disebut *Zona transisi*. Tanda-tanda menunjukkan bahwa perkembangan daerah industri melanggar batas bagian pusat. Nilai tanah tinggi karena diharapkan dijual untuk industri dan perumahan penduduk yang tidak diharapkan menempati tanah secara tetap dan mereka tidak ingin memperbaiki keadaan. Selanjutnya pemukiman penduduk berada dalam keadaan buruk dan disewakan dengan harga murah. Penduduk daerah kumuh ini adalah buruh-buruh kasar dan keluarganya. Semua penduduk dan penduduk asing berlokasi di daerah ini. Zona III adalah *Zona rumah-rumah pekerja* (kaum buruh) yang ditinggali oleh apa yang disebut populasi yang lebih stabil dengan

persentase tertinggi pekerja terlatih dan sebagian kecil penduduk asing dan tak terlatih. Di daerah pertengahan ini banyak masalah antara daerah kumuh dan daerah kaum buruh. Daerah ini biasa disebut lokasi *Deutschlands* atau imigran penduduk koloni yang diwakili oleh generasi kedua keluarga yang bermigrasi dari Zona II. Zona IV dan V adalah perumahan apartemen dan daerah orang yang kerja pulang-pergi (*commuters*), biasanya ditempati oleh keluarga kelas menengah ke atas. (H.I.Bambang Prasetyo, 2007-)

Kolektivitas, seperti keluarga, dalam bertindak dan bertingkah laku ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya serta dapat memenuhi kebutuhannya. Keberfungsian sosial juga menggambarkan semua kegiatan yang dianggap penting dan pokok bagi *performance* beberapa peranan sosial tertentu yang harus dilaksanakan oleh setiap individu sebagai konsekuensi dari keanggotaannya dalam masyarakat. Tentu saja *performance* tersebut dianggap efektif apabila diantaranya bahwa suatu keluarga mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan berhasil. Keberfungsian sosial keluarga mengandung pengertian pertukaran dan kesinambungan, serta adaptasi resiprokal antara keluarga dengan anggotanya, dengan lingkungannya, dan dengan tetangganya. Kemampuan dalam melakukan fungsi sosial secara positif dan adaptif bagi sebuah keluarga, salah satunya adalah jika keluarga itu mampu berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, melakukan peranan dan fungsinya terutama dalam sosialisasi terhadap anggota keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan dipergunakan kerangka Talcott Parsons untuk memahami pola adaptasi yang terjadi dalam masyarakat Betawi terhadap pengembangan Kota Tangerang Selatan. Lebih jauh pola adaptasi dijelaskan oleh Parson yang meliputi penyesuaian (*adaptasi*), tujuan tertentu (*goal attainment*), integrasi (*integration*), serta latency atau mempertahankan suatu pola (*laten pattern maintenance*).

Suatu bentuk adaptasi yang terjadi adalah merupakan rangkaian dari suatu tindakan dan perilaku yang terjadi dari baik oleh individu ataupun kelompok masyarakat terhadap suatu keadaan. Menurut teori AGIL (*adaptation, goal maintenancet, integration, latent*

pattern maintenance) yang dikemukakan oleh Talcott Parson adalah merupakan empat persyaratan fungsional fundamental yang dapat digunakan dalam menganalisis gerakan atau perubahan yang terjadi. Keempat persyaratan ini dapat berlaku untuk berbagai tindakan apa saja. Urutannya dimulai dengan munculnya suatu tipe ketegangan, yang merupakan kondisi ketidaksesuaian antara keadaan suatu sistem sekarang ini dan suatu keadaan yang diinginkan. Ketegangan ini merangsang penyesuaian (*adaptation*) dari suatu tujuan tertentu (*goal maintenance*) serta menggiatkan semangat dorong yang diarahkan kepada pencapaian tujuan itu. Pencapaian tujuan itu memberikan kepuasan yang dengan demikian mengatasi ketegangan atau mengurangnya. Tetapi, sebelum suatu tujuan dapat tercapai, maka harus ada suatu tahap penyesuaian terhadap keadaan genting dari situasi dimana tenaga harus dikerahkan dan alat yang perlu untuk mencapai tujuan itu harus disiapkan. Selama tahap ini, pemuasan harus ditunda. Dalam kasus suatu sistem sosial harus paling kurang ada suatu tingkat solidaritas minimal diantara para anggota sehingga sistem itu dapat bergerak sebagai satu satuan menuju tercapainya tujuan itu. Jadi tahap pencapaian tujuan secara khas diikuti oleh suatu tekanan pada integrasi (*integration*) dimana solidaritas keseluruhan diperkuat, terlepas dari usaha apa saja untuk tercapainya tugas instrumental. Akhirnya, tahap ini akan diikuti oleh tahap mempertahankan pola tanpa interaksi atau bersifat laten (*latent pattern maintenance*). Sistem sosial sebagai suatu keseluruhan juga terlibat dalam saling tukar dengan lingkungannya. Lingkungan sistem sosial itu terdiri dari lingkungan fisik, sistem kepribadian, sistem budaya dan organisme perilaku. Sistem tindakan ini dilihat sebagai berada dalam suatu hubungan hirarki dan bersifat tumpang tindih. Sistem budaya merupakan orientasi nilai dasar dan pola normatif yang dilembagakan dalam sistem sosial dan diinternalisasikan dalam struktur kepribadian para anggotanya. Norma diwujudkan melalui peran-peran tertentu dalam sistem sosial yang juga disatukan dalam struktur kepribadian anggota sistem tersebut. Organisasi perilaku merupakan energi dasar yang dinyatakan dalam pelaksanaan peran dalam sistem sosial. Parsons melihat hubungan antara pelbagai sistem tindakan ini berdasarkan kontrol sibernatik (*cybernetic control*) yang didasarkan pada arus informasi dari sistem budaya ke sistem sosial, ke sistem kepribadian dan ke organisasi perilaku. Energi yang muncul dalam arus tindakan adalah dari arah yang

sebaliknya, yang bermula dari organisme perilaku. Hubungan antara sistem-sistem tindakan umumnya dan persyaratan-persyaratan fungsional adalah sebagai berikut :

Sistem Tindakan	Persyaratan fungsional
Sistem budaya	Pemeliharaan pola-pola yang laten
Sistem sosial	Integrasi
Sistem kepribadian	Pencapaian tujuan
Organisme perilaku	Adaptasi

Pemeliharaan pola-pola yang laten (*laten pattern maintenance*) dihubungkan dengan sistem budaya, karena fungsi ini menekankan nilai dan norma budaya yang dilembagakan dalam sistem sosial. Masalah integrasi berhubungan dengan interelasi antara pelbagai satuan dalam sistem sosial. Pencapaian tujuan dihubungkan dengan sistem kepribadian dalam arti bahwa tujuan sistem-sistem sosial mencerminkan titik temu dari tujuan-tujuan individu dan memberikan mereka arah sesuai dengan orientasi nilai bersama. Hubungan antara pencapaian tujuan dengan sistem kepribadian ini mencerminkan perspektif Parsons bahwa tindakan selalu diarahkan pada tujuannya. Kemudian, sifat dari masalah penyesuaian ditentukan sebagian besar oleh sifat-sifat biologis individu sebagai organisme yang berperilaku dengan persyaratan biologis dasar tertentu yang harus dipenuhi oleh mereka agar tetap hidup. "(Zoebir, 2008)



BAB III

METODOLOGI

A. Hipotesa

Perubahan okupasi merupakan salah satu pola adaptasi yang dilakukan warga pada saat pembentukan kota Tangerang Selatan

B. Lokasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008. Saat ini kota Tangerang Selatan terdiri atas 7 kecamatan, yang dibagi lagi atas 49 kelurahan dan 5 desa. 7 (tujuh) Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Serpong dengan luas 2.404 km²
2. Serpong Utara dengan luas 1.784 km²
3. Ciputat dengan luas 1.838 km²
4. Ciputat Timur dengan luas 1.543 km²
5. Pondok Aren dengan luas 2.988 km²
6. Pamulang dengan luas 2.682 km²
7. Setu dengan luas 1.480 km²

Pemilihan sampel Kecamatan akan dipilih secara purposive, dengan alasan kantor pemerintahan terletak di kecamatan Pamulang. Kecamatan Pamulang terdiri dari 8 (delapan) kelurahan yaitu sebagai berikut :

1. Kelurahan Pondok Benda
2. Kelurahan Benda Baru
3. Kelurahan Bambu Apus
4. Kelurahan Kedaung
5. Kelurahan Pamulang Barat
6. Kelurahan Pamulang Timur
7. Kelurahan Pondok Cabe Udik
8. Kelurahan Pondok Cabe Ilir



PROFIL KOTA TANGERANG SELATAN

A. Sejarah Terbentuknya Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten, Indonesia. Provinsi Banten terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 kota, dan Tangerang Selatan adalah merupakan salah satu kotanya. Tujuh Kota/ Kabupaten lainnya adalah sebagai berikut: Kabupaten Lebak(ibu kotanya Rangkasbitung), Kabupaten Pandeglang (Pandeglang), Kabupaten Serang (Ciruas), Kabupaten Tangerang (Tigaraksa), Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang.

Kota Tangerang Selatan dibentuk sebagai kota otonom pada tanggal 29 Oktober 2008 dari wilayah Kabupaten Tangerang. Sebelumnya adalah Kota Cipasera. Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008. Wilayah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Rencana ini berawal dari keinginan warga di wilayah selatan untuk mensejahterakan masyarakat.

Pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini masuk ke dalam Karesidenan Batavia dan mempertahankan karakteristik tiga etnis, yaitu Suku Sunda, Suku Betawi, dan Suku Tionghoa. Wacana pembentukan kota otonom Tangerang Selatan (dahulu Cipasera) muncul sejak 1999. Namun belum adanya kata sepakat antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang jumlah kecamatan yang akan tergabung dalam kota otonom ini, menghambat proses pembentukannya. Sebagian besar warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ciputat, Pamulang, Serpong, Cisauk, dan Pondok Aren menginginkan lepas dari Kabupaten Tangerang. Untuk mewujudkan keinginan itu, pada 19 November 2000, dibentuk Komite Persiapan Pembentukan Daerah Otonom (KPPDO) Kota Cipasera. Para aktivis KPPDO, pada 2002, pun melakukan kajian awal untuk mendata kelayakan wilayah Cipasera menjadi sebuah kota otonom setingkat kotamadya. Wilayah Cipasera yang memiliki luas 239.850 km persegi, kini telah menjadi daerah perkotaan yang ramai. Pada tahun 2000, jumlah penduduk yang tinggal di lima kecamatan itu hampir mencapai 942.194 (Pagedangan diikutkan) atau setara

dengan 34,5 persen penduduk Kabupaten Tangerang. Sayangnya, wilayah yang telah berkembang menjadi kota itu tidak dibarengi dengan penataan kota yang baik.

Kota Tangerang Selatan merupakan kota bentukan yang mempunyai sarana pendidikan yang cukup lengkap dari mulai tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Adapun fasilitas pendidikan yang terdapat di wilayah Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

- Universitas Terbuka,
- Universitas Pamulang,
- AMIK Wahana Mandiri,
- SMK Sasmita Jaya,
- Sekolah SD-SMP-SMU Muhammadiyah,
- SD-SMP-SMU Mater Dei,
- TK-SD-SMP Kristen Ora et Labora,
- SD Islam Al-Azhar Pamulang,
- SDI AT-Taqwa,
- SDIT As-Salaamah,
- SDIT Al-Azkar,
- SMPN 4 Tangerang Selatan,
- SMPN 2 Pamulang,
- SMPN 3 Pamulang,
- SMAN 1 Pamulang,
- SMAN 2 Pamulang

(<http://bagianpemerintahantansel.blogspot.com/2010/01/profil-kota-tangerang-selatan-tahun.html>)

B. Sejarah Masyarakat Tangerang

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1905 dan 1930, Kota Tangerang telah dihuni oleh masyarakat dari berbagai etnik. Tidak diketahui lagi etnik mana yang menjajakkan kakinya pertama kali di sini. Beberapa etnik yang menempati Kota Tangerang sejak saat itu adalah etnik Sunda, Jawa, Betawi, Cina, Arab dan Eropa. Kelompok etnik Sunda sebagian besar menempati daerah Tangerang Selatan dan Tangerang Tengah yang meliputi wilayah kecamatan Tangerang, Cikupa, Serpong, Curug, Tigaraksa, dan Legok. Menurut kronik sejarah Banten, kedatangan orang Sunda di Tangerang berawal dari keikutsertaan orang-orang Priangan menyerbu Batavia bersama pasukan Mataram, namun setelah usai perang mereka tidak kembali

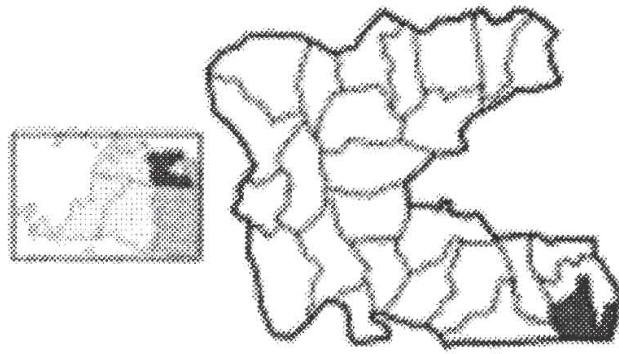
kedaerahnya melainkan minta izin tetap tinggal di Tangerang. Sampai sekarang mereka dapat diidentifikasi sebagai orang Sunda. Selain tetap menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari, mereka menyebut kampung tempat mereka tinggal dengan nama Sunda seperti Kampung Priangan (sekarang Priang), Lengkong Sumedang dan lain-lainnya. Kelompok etnik Sunda masa itu pada umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan mengusahakan barang-barang kerajinan. Kelompok etnik Betawi sebagian besar menempati wilayah sepanjang perbatasan Batavia seperti wilayah kecamatan Teluknaga, Batuceper, Ciledug, dan Ciputat. Pada masa itu mereka hidup sebagai petani yang sekaligus juga pedagang. Barang dagangan yang mereka jual terutama adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Wilayah mereka relatif dekat dengan Batavia sehingga memungkinkan mereka menjual hasil pertanian ke Batavia. Kelompok etnik Jawa menempati wilayah Tangerang Barat Laut dan Tangerang Utara terus menyusuri pantai utara pulau Jawa, yang meliputi kecamatan Mauk, Kresek, dan Rajeg. Kelompok ini jika dilihat dari segi bahasa diperkirakan berasal dari keturunan sisa-sisa prajurit Mataram. Mereka sehari-hari menggunakan bahasa Jawa dan pada umumnya hidup sebagai petani nelayan. Kelompok Etnik Cina diperkirakan datang ke Tangerang, bersamaan dengan Belanda yang menduduki dan membangun Batavia. Pembangunan Kota Batavia pada waktu itu membutuhkan sejumlah tenaga tukang sehingga perlu didatangkan imigran-imigran Cina ke Batavia. Selain itu ada pula orang-orang Cina yang telah tinggal di sini sebelum Belanda datang. Mereka hidup sebagai tukang pembuat arak. Arak buatan orang Cina ini sangat disukai awak kapal Belanda. Di sisi lain Kelompok Etnik Cina bukan hanya memberi sokongan tenaga kerja tetapi mereka juga membantu dalam keuangan pajak. Gelombang besar kedatangan kelompok ini terjadi pada pertengahan abad 18 sehingga berakibat banyak pengangguran dan terjadi gangguan keamanan. Pada tahun 1740 timbul pemberontakan Cina di Batavia. Setelah kejadian itu, kelompok etnik ini dilarang tinggal di kota, selain harus tinggal dalam satu perkampungan agar mudah diawasi. Perkampungan kelompok etnik Belanda sebenarnya merupakan kelompok kecil tetapi menduduki posisi penting, dan kehidupan ekonomi mereka juga lebih baik. Mereka banyak menduduki jabatan tinggi dalam dinas sipil dan militer. Misalnya, waktu itu sebagai direktur dan staf perkebunan. Adapun kelompok yang paling sedikit pada masa itu adalah etnik Arab. Menurut sensus

tahun 1905, etnik Arab hanya 20 orang dan sensus tahun 1930 jumlah kelompok meningkat menjadi 185 orang. (<http://iamhoogiez.wordpress.com/4-asal-muasal-masyarakat-tangerang/>)

Sebagian besar anggota masyarakat memeluk agama Islam dengan semangat religius yang tinggi, tetapi pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Potensi dan kekhasan budaya masyarakat Tangerang Selatan tidak jauh berbeda dengan masyarakat Banten, antara lain seni bela diri Pencak silat, Debus, Rudad, Umbruk, Tari Saman, Tari Topeng, Tari Cokek, Dog-dog, Palingtung, dan Lojor. Di samping itu juga terdapat peninggalan warisan leluhur antara lain Masjid Agung Banten Lama, Makam Keramat Panjang, dan masih banyak peninggalan lainnya. Dari data yang diperoleh dari Propinsi bahwa Suku Banten adalah merupakan penduduk mayoritas yang dapat kita lihat sebagai berikut: Suku Banten (47%), Sunda (23%), Jawa (12%), Betawi (10%), Tionghoa (1%). Dan Agama yang dianut adalah sebagai berikut: Agama Islam (96,6%), Kristen (1,2%), Katolik (1%), Buddha (0,7%), Hindu (0,4%). Penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten berbicara menggunakan dialek yang merupakan turunan dari bahasa Sunda Kuno. Dialek tersebut dikelompokkan sebagai bahasa kasar dalam bahasa Sunda modern yang memiliki beberapa tingkatan dari tingkat halus sampai tingkat kasar (informal), yang pertama tercipta pada masa Kesultanan Mataram menguasai Priangan (bagian tenggara Provinsi Jawa Barat). Namun demikian, di Serang dan Cilegon, bahasa Jawa Banten digunakan oleh etnik Jawa. Dan, di bagian utara Kota Tangerang, bahasa Indonesia dengan dialek Betawi juga digunakan oleh pendatang beretnis Betawi. Di samping bahasa Sunda, bahasa Jawa dan dialek Betawi, bahasa Indonesia juga digunakan terutama oleh pendatang dari bagian lain Indonesia (<http://scriptintermedia.com/view.php?id=4704>)

C. Profil Kecamatan Pamulang

Kecamatan Pamulang adalah merupakan salah satu kecamatan yang dipilih sebagai lokasi penelitian dari 7 Kecamatan yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Sebelum Kota Tangerang Selatan menjadi kota otonom, Pamulang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tangerang.



Peta lokasi Kecamatan Pamulang

(http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:locator_Kecamatan_Pamulang_di_Kabupaten_Tangerang.png)

Di Pamulang terdapat beberapa kompleks perumahan seperti Reni Jaya, Pamulang Vila, Gria Jakarta, Vila Pamulang Mas, Pamulang Estate(MA),BPI (Bukit Pamulang Indah), Puri Pamulang. Komplek-komplek perumahan ini mulai berdiri tahun 1983. Di Pamulang juga berdiri Giant Department Store, Superindo, Carrefour yang menandakan pertumbuhan ekonomi di kecamatan ini sangat pesat. Dahulu sempat pula didirikan Alfa Toko Gudang Rabat, Dwima, serta Cinema 21.

Kecamatan Pamulang terbagi atas 8 kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Pondok Benda
2. Kelurahan Benda Baru
3. Kelurahan Bambu Apus
4. Kelurahan Kedaung
5. Kelurahan Pamulang Barat
6. Kelurahan Pamulang Timur
7. Kelurahan Pondok Cabe Udik
8. Kelurahan Pondok Cabe Ilir



PEMBAHASAN

Pembentukan Kota Tangerang Selatan tidak dapat dipungkiri lagi telah membawa perubahan pada masyarakat Tangerang Selatan sendiri. Hal tersebut dapat dilihat secara fisik dengan keberadaan berbagai wilayah pemukiman baru. Secara mudah dapat terlihat bahwa semakin berkembang suatu kota dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, menyebabkan meningkatnya kebutuhan untuk daerah pemukiman. Pada umumnya lahan kosong untuk pemukiman di Jakarta banyak terletak di wilayah pinggiran dan pada umumnya dimiliki oleh orang Betawi, sehingga dipakainya wilayah tersebut sebagai pemukiman menyebabkan banyak orang Betawi yang pindah ke luar Jakarta. Terlihat jelas adanya perubahan fungsi lahan menjadi rumah tinggal/perumahan memang cukup banyak di wilayah Tangerang Selatan ini terlihat dari menjamurnya berbagai kompleks perumahan antara lain di wilayah Pamulang Timur, seperti perumahan Bunga Pratama, Pinus, Vila Inti Persada, Bukit Pamulang Indah dan masih ada beberapa lainnya. Seperti yang diakui oleh informan, di daerah Pamulang Timur telah terjadi peningkatan permintaan akan rumah kontrakan seiring dengan semakin banyaknya pendatang yang bertempat tinggal di wilayah Tangerang Selatan.

Menurut informan dengan adanya pembentukan Tangerang Selatan berdampak juga terhadap kemajuan masyarakat setempat seperti program PKK atau Posyandu yang dikelola oleh kaum perempuan di Wilayahnya cukup bagus terbukti dengan diperolehnya sejumlah penghargaan di tingkat Kota. Berdirinya berbagai organisasi kemasyarakatan seperti majelis taklim dan Forum Betawi rempug (FBR) juga turut menandai adanya perkembangan di bidang sosial politik. Selain itu kemajuan yang dirasakan adalah adanya bantuan untuk sekolah-sekolah disekitar tempat tinggalnya, jalan-jalan kampung di semen atau dipasang puffing blok, demikian juga jalan-jalan diaspal lebih baik dari pada saat status kabupaten. Demikian juga untuk saat ini bentuk bantuan yang bisa dirasakan dengan adanya kota Tangerang Selatan adalah bantuan bagi mesjid dan guru ngaji, serta uang insentif untuk pejabat pemerintah hingga setingkat ketua RT.

Secara fisik perubahan yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan mengacu pada adanya penambahan beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Tangerang Selatan.



Perubahan yang disebabkan oleh pembentukan Kota Tangerang Selatan ini secara tidak langsung menyebabkan Orang Betawi harus menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat sekarang dengan tujuan agar kehidupan mereka tetap dapat berjalan baik sebagai Orang Betawi maupun sebagai penduduk Kota Tangerang Selatan. Hal ini mengacu pada adaptasi yang harus mereka lakukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Talcott Parson bahwa keseimbangan dari suatu masyarakat dapat tercapai ketika fungsi-fungsi dari sub-sub sistem dapat berjalan dengan semestinya. Menurut Talcott Parsons, sebagaimana dikutip oleh Margaret M. Poloma dinyatakan bahwa ada fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem untuk kelestarian sistem tersebut. Adapun fungsi-fungsi yang ada demi kelestarian suatu sistem, yaitu (1) yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem pada saat berhubungan dengan lingkungannya; (2) yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sarana alat yang perlu dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, berdasarkan dua pernyataan atau dua premis itu Talcott Parsons mencetuskan pemikiran mengenai adanya empat fungsi utama dalam hubungannya dengan sistem itu ialah berikut ini. Salah satunya adalah adaptasi dimana sistem itu harus menyesuaikan diri dengan

lingkungannya. Dalam pengertian adaptasi ini juga terkandung maksud mengacu pada kemampuan sistem untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan lingkungannya serta membaginya ke semua jaringan sistem. Jadi, untuk keperluan adaptasi ini sistem tersebut harus didukung oleh adanya sarana-sarana yang dibutuhkan (wagiyo: 2003)

Orang Betawi sebagai bagian dari masyarakat Tangerang Selatan harus dapat menyesuaikan diri dengan terbentuknya kota Tangerang Selatan, dengan segala perubahan yang terjadi. Upaya adaptasi yang dilakukan oleh Orang Betawi ini sifatnya memaksa, dalam arti ketika mereka tidak melakukan adaptasi maka yang timbulnya nantinya adalah munculnya ketidakseimbangan dalam masyarakat Tangerang Selatan maupun pada lingkungan Orang Betawi sendiri. Situasi konflik dimungkinkan akan muncul, ketika Orang Betawi merasa posisi mereka semakin tersisihkan dengan segala perubahan di Tangerang Selatan. Mereka dapat melakukan tindakan sebagai upaya untuk memulihkan kembali posisi mereka, yang tidak jarang tindakan tersebut malah akan memicu konflik dengan lingkungan masyarakat sekitarnya.

Oleh karena itu untuk tercapainya keseimbangan di masyarakat Tangerang Selatan maupun di lingkungan Orang Betawi sendiri, maka Orang Betawi perlu melakukan adaptasi. Pertimbangan ekonomi seperti ini menjadi alasan utama mereka melakukan adaptasi, karena adanya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi oleh orang Betawi yang disebabkan pada adanya persaingan dengan pendatang dalam memperebutkan sumber langka yang berupa perebutan lapangan pekerjaan.

Adaptasi yang mereka lakukan antara lain terkait dengan adanya perubahan okupasi yang dilakukan Orang Betawi, yang secara tidak langsung berhubungan dengan bagaimana hubungan sosial mereka dengan pendatang. Perubahan okupasi terjadi antara lain karena kedatangan para pendatang untuk bermukim di wilayah mereka. Kedatangan orang pendatang menyebabkan adanya peralihan penggunaan lahan tanah orang Betawi yang tidak lagi menjadi lahan pertanian, tanah bagi orang Betawi cenderung lebih banyak difungsikan sebagai lahan pertanian sehingga pekerjaan orang Betawi adalah petani baik sawah maupun ladang. Kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan utama sebagai petani memudar atau bahkan dapat dibilang tidak ada lagi

orang Betawi yang bekerja sebagai petani, keadaan ini mengkondisikan orang Betawi untuk mencari bidang pekerjaan baru. Pengalihan lahan orang Betawi menjadi lahan pemukiman maupun lahan komersial lainnya memberikan peluang pekerjaan baru bagi Orang Betawi. Komplek pemukiman baru seringkali memperkerjakan Orang Betawi yang bertempat tinggal di sekitar komplek. Seperti pekerjaan sebagai hansip, pembantu rumah tangga, tukang cuci, pengemudi ojek maupun sopir pribadi pada umumnya dilakukan oleh Orang Betawi sekitar.

Kondisi peralihan penggunaan lahan tanah tersebut merupakan realita yang tidak dapat dihindari oleh orang Betawi sendiri yaitu adanya kebutuhan ekonomi yang lebih mendesak serta pandangan jauh ke depan bahwa dengan memanfaatkan tanah bukan sebagai lahan pertanian akan lebih menjanjikan atau menguntungkan. Seperti yang dikemukakan oleh informan bahwa usaha menyewakan rumah petak menjadi usaha utama Orang Betawi sekarang. Karena dari pada lahan hanya untuk pertanian yang sudah tidak lagi bisa diberdayakan maka lebih baik lahan tersebut dibangun rumah petak beberapa "pintu" yang lebih menghasilkan uang secara rutin. Seorang informan dari Pamulang Timur yang menegaskan bahwa wilayahnya dulu hanya ada kontrakan 20 pintu sekarang sudah lebih dari 50 pintu. Hal tersebut menggambarkan bahwa usaha diluar pertanian lebih dapat menjamin kebutuhan ekonomi mereka daripada hanya mengandalkan tanah sebagai lahan garapan.

Hubungan sosial yang terjadi antara Orang Betawi dengan pendatang terjalin dengan baik. Tersirat dari anggapan Orang Betawi bahwa mereka tidak pernah bermasalah dengan orang pendatang. Dengan latar belakang adanya kebutuhan ekonomi dari orang Betawi yang dapat terpenuhi dengan adanya orang pendatang, maka permasalahan itu bisa diredam.



SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

- Pembentukan Kota Tangerang Selatan telah menyebabkan adanya perubahan baik secara fisik maupun non fisik pada kehidupan sosial Orang Betawi di daerah Tangerang Selatan. Perubahan fisik dapat dilihat pada adanya berbagai pembangunan fasilitas bagi masyarakat. Perubahan non fisik terkait dengan pola adaptasi yang harus dilakukan oleh Orang Betawi
- Pola adaptasi yang dilakukan oleh Orang Betawi berkaitan dengan perubahan okupasi yang harus mereka tempuh sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar yang mengalami perubahan antara lain dengan semakin banyaknya pendatang yang bermukim di kota Tangerang Selatan.
- Adaptasi yang dilakukan oleh Orang Betawi merupakan upaya untuk tetap terwujudnya keseimbangan dalam masyarakat (sebagai suatu sistem) Tangerang Selatan maupun masyarakat Betawi sendiri. Dengan tercapainya keseimbangan dalam masyarakat maka tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat sebagai suatu sistem akan dapat tetap terlaksana.

B. REKOMENDASI

Hasil Penelitian direkomendasi sebagai bahan pengayaan untuk materi bahan ajar/BMP UT khususnya untuk mata kuliah :

1. BMP - Pengantar Sosiologi (ISIP 4410) :

Dalam Pengantar Sosiologi perlu untuk memberikan bahan atau materi dan contoh realitas yang terjadi dalam masyarakat. Serta menjelaskan sistem sosial yang ada dalam masyarakat dan pola adaptasinya.

2. BMP-Teori Perubahan Sosial (SOSI 4305) :

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat sebagai dampak dari suatu pembangunan seperti yang terjadi dalam suatu wilayah ini adalah suatu realitas.

Hal ini dapat dijadikan materi atau bahan diskusi /latihan mahasiswa dalam modul.



DAFTAR PUSTAKA

- Chalid, P., 2006, *Teori dan Isu Pembangunan*, BMP MAPU 5102. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta
- Ezra Park, R. and W. Burgess, E.W. ,1952, *Social Disorganization Theory*. [Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_disorganization_theory: (Diakses tanggal 28 Februari 2007)
- Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*:
<http://saripuddin.wordpress.com/fungsionalisme-struktural-talcott-parsons/>
- Irawan, P., 1999, *Logika dan Prosedur Penelitian*. STIA-LAN Press. Jakarta
- Lahan Pertanian Kian Menyusut*, <http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=UIAKDAZWUFBU>)
- Laeyendecker, L. ,1991, *Tata Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Gramedia, Jakarta.
- Mardiasmo, MBA, Akt- Th.1- N0.4 Juni 2002, Artikel- *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneter Indonesia, Jakarta 7 Mei 2002) : (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm)
- Neuman, R., 1997, *Qualitative and Quantitative Approaches*, London: Allyn and Bacon.
- Prasetyo, H.I.Bambang, 2007; *Dampak Perubahan Okupasi Warga Di Sekitar Pembangunan Jalan Tol Dan Pengembangan Perumahan Baru Terhadap Disorganisasi Sosial (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Balaraja Kabupaten Serang Propinsi Banten)*, Tangerang, Pondok Cabe
- Profil Profil Tangerang Selatan* : http://id.wikipedia.org/wiki/Pamulang,Tangerang_Selatan
- Tangerang Selatan* : http://id.wikipedia.org/wiki/Pamulang,Tangerang_Selatan_Profil_kabupaten/Kota, : <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/banten/tangerang.pdf>
- Rahardjo., 2001, *Sosiologi Pedesaan*. BMP SOSI 4303. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sjafri, S. ,2002, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sutherland, E., 1939, *Social Disorganization Theory* :
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_disorganization_theory : Diakses tanggal 28 Februari 2007
- Sritua, A. (1998). *Teori dan kebijaksanaan Pembangunan*. Jakarta: CIDES

Situs web resmi: <http://www.tangerangselatankota.go.id/> : Tanggal 25 januari 2010

Radarbanten.com, 4 Mei 2009

Tangerangonline.com, 4 Mei 2009

Wagiyo.,2003, *Teori Sosiologi Modern* ,BMP SOSI4206. Pusat
Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta

Zoebir, Zuryawan Isvandiar,10 Agustus, 2008, Paper, *Kerangka Teori Talcott Parsons
Untuk Memahami Integrasi Sosial*:
<http://zuryawanisvandiarzoebir.wordpress.com/2008/08/10/>

UNIVERSITAS TERBUKA



LAMPIRAN 1 : Pedoman Wawancara

Informan Warga

Identitas diri :

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan
4. Alamat
5. Pekerjaan

A. Sebelum ada Tangerang Selatan :

1. Apakah sudah ada sosialisasi tentang pembangunan Tangerang Selatan dari Pemda? (seperti apa kegiatannya, berapa kali dll)
2. Apakah terjadi benturan kepentingan antara warga?
3. Apakah terjadi masalah selama proses pembentukan Tangerang Selatan berlangsung?
4. Apakah ada harapan ke arah kehidupan yang lebih baik dengan adanya pembentukan Tangerang Selatan

B. Setelah ada Tangerang Selatan

1. Apakah terjadi perpindahan fungsi lahan yang dimiliki oleh warga setelah pembentukan Tangerang Selatan
2. Apakah terjadi pengalihan atau perubahan mata pencaharian ?
3. Apakah kehidupan sosial menjadi lebih baik ? (kondisi hubungan sosial antar warga)
4. Apakah kondisi ekonomi warga menjadi semakin baik setelah ada pembentukan Tangerang Selatan?
5. Bagaimana hubungan penduduk asli dengan warga pendatang ?
6. Apakah ada manfaat dengan datangnya warga baru?
7. Masalah sosial apa yang terjadi ? (masalah yang terjadi antar warga atau kampung)
8. Bagaimana pola interaksi antar warga ?
9. Bagaimana pola pengelompokkan warga?
10. Bagaimana sistem kekerabatan antar warga ?

Informan: Pemda

Identitas diri :

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan
4. Alamat
5. Pekerjaan

A. Sebelum ada Tangerang Selatan

1. Apakah sudah ada sosialisasi tentang pembangunan Tangerang Selatan kepada warga?
2. Apakah terjadi benturan kepentingan antara warga ?
3. Apakah terjadi masalah selama proses pembentukan Tangerang Selatan berlangsung?
4. Apakah pembangunan Tangerang Selatan sudah sesuai dengan rencana pemerintah ? (Master plan)
5. Bagaimana dengan konsentrasi wilayah (perumahan, pertanian, industri) ?
6. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembentukan Tangerang Selatan?

B. Setelah ada Tangerang Selatan

1. Apakah terjadi perpindahan fungsi lahan yang dimiliki warga setelah ada Tangerang Selatan?
2. Apakah terjadi pengalihan mata pencaharian warga setelah adanya Tangerang Selatan ?
3. Apakah *kehidupan sosial* warga menjadi lebih baik setelah ada Tangerang Selatan ?
4. Apakah *kondisi ekonomi* warga menjadi semakin baik setelah ada Tangerang Selatan ?
5. Bagaimana hubungan antara warga asli dengan warga pendatang ?
6. Apakah ada manfaat dari datangnya warga baru terhadap perkembangan wilayah ?
7. Masalah sosial apa yang terjadi selama ini setelah adanya Tangerang Selatan ?

LAMPIRAN 2: Curriculum Vitae

Identitas Diri Peneliti :

Nama	Dra. Rosa Tosaini, M.Hum	
Alamat	Jl. Cilandak KKO 40 RT. 15/05 Jakarta 12550	
Tempat/Tanggal Lahir	DI. Yogyakarta 29 Mei 1949	
Jenis kelamin	Perempuan	
NIP	19490529 1982032001	
Jabatan/Pangkat	Lektor/IIIc	
Fakultas/Jurusan	FISIP/ Sosiologi	
Jenjang Pendidikan	S2 Filsafat Universitas Indonesia	
Telp/HP	08128214950	
Email	rosat@ut.ac.id	
Penelitian	Persepsi Kalangan Akademisi Terhadap Kinerja Partai Politik (Studi kasus di Universitas Terbuka) Tahun 2009	2009
	Suatu Tinjauan Sosiologi Tentang Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Kabupaten Bogor (Studi Kasus di Desa Jabon Mekar Kabupaten Bogor), tahun 2008	2008
	Studi Pengembangan Kit Tutorial Berbasis Multimedia Matakuliah Pengantar Statistik Sosial	2007
	Dampak perubahan Okupasi Warga di sekitas Pembangunan Jalan 28old an Pengembangan Perumahan Baru terhadap Disorganisasi Sosial (studi kasus di Wilayah Kabupaten Serang), tahun 2007	2007

Identitas Diri Peneliti :

Nama	HI. Bambang Prasetyo, M.Si	
Alamat	Puri Gading Vila Besakih H8 No.20 Jati Melati- Pondok Melati- Bekasi	
Tempat/Tanggal Lahir	Jakarta, 24 Oktober 1973	
Jenis kelamin	Laki-laki	
NIP	197310231999031001	
Jabatan/Pangkat	Lektor Kepala/IIId	
Fakultas/Jurusan	FISIP/Sosiologi	
Jenjang Pendidikan	S2 Sosiologi Universitas Indonesia	
Telp/HP	08158846559	
Email	hendrikusi@ut.ac.id	
Penelitian	Afiliasi Politik Pegawai Negeri : Studi terhadap faktor-faktor yang memperngaruhi model afiliasi politik individu dalam memilih partai politik	2009
	Pengembangan model klaster untuk meningkatkan peran “Imah Tasik” kota Tasikmalaya Menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Priangan Timur Tahun 2012	2008
	Dampak Perubahan Okupasi Warga di Sekitar Pembangunan jalan Tol dan Pengembangan Perumahan Baru terhadap Dan Pengembangan Perumahan Baru Terhadap Disorganisasi Sosial. (Studi di Wilayah Kecamatan Balaraja, Kanupaten Serang, Propinsi Banten), Tahun 2007	2007
	Perbandingan pemahaman mahasiswa terhadap materi pengantar statistik sosial antara mahasiswa UT dan mahasiswa UI (reguler dan ekstensi), Tahun 2006	2006
	Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Anggota DPRD di 5 Kabupaten di Jawa	2005

Identitas Diri Peneliti :

Nama	Dra. Parwitaningsih, M.Si	
Alamat	Komplek Imigrasi No.1-Cengkareng- Jakbar.	
Tempat/Tanggal Lahir	Padang, 12 Juli 1967	
Jenis kelamin	Perempuan	
NIP	196712071999	
Jabatan/Pangkat	Lektor /IIIc	
Fakultas/Jurusan	FISIP/Sosiologi	
Jenjang Pendidikan	S2 Sosiologi Universitas Indonesia	
Telp/HP	0818979148	
Email	parwita@ut.ac.id	
Penelitian	Persepsi Kalangan Akademisi Terhadap Kinerja Partai Politik (Studi kasus di Universitas Terbuka)	2009
	Suatu Tinjauan Sosiologi Tentang Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Kabupaten Bogor (Studi Kasus di Desa Jabon Mekar Kabupaten Bogor)	2008
	Pergulatan Wacana Gender dalam Islam (Studi Pada LSM Rahima)	2007
	Kajian Hak Cipta Bahan Ajar Multimedia Universitas Terbuka (Studi kasus bahan ajar multimedia di FISIP-UT)	2006